

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (686328) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, Januari 2019
Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
VI. Lampiran-Lampiran	51

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH (686328)
Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
TELEPON / FAXIMILE 024-8505189

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2019

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp39.336.000 atau mencapai 0 persen karena estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp518.806.257.127 atau sebesar 73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp714.930.473.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.792.462.377 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.310.229.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.481.445.936; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp787.441. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.609.011 dan Rp32.777.853.366.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.500.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar (Rp496.323.744.926) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp496.316.244.926. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp17.486.000 sehingga diperoleh Defisit-LO sebesar (Rp496.298.758.926).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp76.778.503.755 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp496.298.758.926) dikurangi dengan koreksi yang mengurangi ekuitas yang merupakan koreksi lain-lain senilai (Rp3.401.134.776) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp455.699.243.313, sehingga Ekuitas entitas per tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar (Rp44.000.650.389) dibandingkan dengan Ekuitas awal tahun yaitu menjadi senilai Rp32.777.853.366.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	39.336.000	0,00	25.899.848
JUMLAH PENDAPATAN		-	39.336.000	0,00	25.899.848
BELANJA NEGARA	B.2				
Rupiah Murni		462.311.352.000	272.095.883.271	58,86	61.149.038.930
Belanja Pegawai	B.3	2.567.438.000	1.713.913.676	66,76	1.063.948.507
Belanja Barang	B.4	451.835.914.000	263.370.870.495	58,29	51.638.402.012
Belanja Modal	B.5	7.908.000.000	7.011.099.100	88,66	8.446.688.411
PINJAMAN dan HIBAH		252.619.121.000	246.710.373.856	97,66	42.377.543.377
Belanja Barang	B.6	252.619.121.000	246.710.373.856	97,66	42.377.543.377
JUMLAH BELANJA		714.930.473.000	518.806.257.127	72,57	103.526.582.307

II. NERACA

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	-	66.483.162.590
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.2	20.307.610.000	2.059.986.000
Persediaan	C.3	2.619.000	3.997.000
Jumlah Aset Lancar		20.310.229.000	68.547.145.590
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	17.579.378.911	10.747.839.811
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	9.375.000	9.375.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	149.320.000	-
Akumulasi Penyusutan	C.7	(5.256.627.975)	(2.453.376.886)
Jumlah Aset Tetap		12.481.445.936	8.303.837.925
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.8	14.250.000	3.190.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(13.462.559)	(3.066.000)
Jumlah Aset Lainnya		787.441	124.000
JUMLAH ASET		32.792.462.377	76.851.107.515
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.10	14.609.011	72.603.760
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.609.011	72.603.760
JUMLAH KEWAJIBAN		14.609.011	72.603.760
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	32.777.853.366	76.778.503.755
JUMLAH EKUITAS		32.777.853.366	76.778.503.755
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.792.462.377	76.851.107.515

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	7.500.000	18.823.602
JUMLAH PENDAPATAN		7.500.000	18.823.602
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.713.913.676	1.063.948.507
Beban Persediaan	D.3	41.400.250	33.281.800
Beban Barang dan Jasa	D.4	391.228.460.271	58.161.396.586
Beban Pemeliharaan	D.5	1.398.402.276	1.032.185.013
Beban Perjalanan Dinas	D.6	99.124.730.805	32.971.611.789
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.816.837.648	1.341.888.287
JUMLAH BEBAN		496.323.744.926	94.604.311.982
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(496.316.244.926)	(94.585.488.380)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	17.486.000	14.350.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			7.500
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		17.486.000	14.342.500
SURPLUS/DEFISIT LO		(496.298.758.926)	(94.571.145.880)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	76.778.503.755	26.685.635.632
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(496.298.758.926)	(94.571.145.880)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.401.134.776)	(5.987.131.079)
Koreksi Lain-lain	E.3.1	(3.401.134.776)	(5.987.131.079)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	455.699.243.313	150.651.145.082
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(44.000.650.389)	50.092.868.123
EKUITAS AKHIR	E.6	32.777.853.366	76.778.503.755

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketata usahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang:

1. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
2. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.
3. Menandatangani perjanjian kerjasama.

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

1. Menyusun dan ...

2. Melakukan ...

3. Menentukan ...

4. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Visi Bawaslu 2015-2019 “**Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas**”, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ikut melaksanakan Misi Bawaslu berupa:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;
5. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau

telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah* telah mengadakan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersumber dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan anggaran Hibah Langsung yang berasal dari Hibah Langsung. Anggaran yang bersumber dari rupiah murni adalah sebesar Rp.349.552.395.000 sedangkan anggaran yang bersumber dari hibah langsung sebesar Rp.252.619.121.000. Perubahan dari DIPA awal menjadi DIPA terakhir berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain sebagai berikut:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	719.553.000	2.567.438.000
Belanja Barang	319.874.842.000	451.835.914.000
Belanja Modal	28.958.000.000	7.908.000.000
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang	-	252.619.121.000
Jumlah Belanja	349.552.395.000	714.930.473.000

Adapun rincian anggaran yang berasal dari hibah langsung adalah sebagai berikut:

NO	BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	NILAI HIBAH YANG MASUK DIPA TA. 2018
1	BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	228.757.355.000
2	BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS	5.447.522.000
3	BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR	2.777.135.000
4	BAWASLU KABUPATEN KUDUS	2.137.234.000
5	BAWASLU KABUPATEN MAGELANG	5.487.440.000
6	BAWASLU KABUPATEN TEGAL	3.713.569.000
7	BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	3.268.746.000
8	BAWASLU KOTA TEGAL	1.030.120.000
	JUMLAH	252.619.121.000

Realisasi
Pendapatan
Rp39.336.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.336.000 atau mencapai 0 persen karena estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Realisasi pendapatan diantaranya terdiri dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang merupakan hasil temuan dari pemeriksaan BPK RI serta pengembalian belanja dari anggaran hibah tahun 2008 oleh Panwas Kabupaten Kabupaten Klaten dan Panwas Kabupaten Wonogiri yang anggarannya belum teregister oleh Kementerian Keuangan. Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan 51,88 % dari realisasi pendapatan TA 2017, hal ini disebabkan pada TA 2018 terdapat pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan BPK di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 7 Bawaslu Kabupaten/Kota. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dengan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	39.336.000	25.899.848	51,88
Jumlah	39.336.000	25.899.848	51,88

Adapun bukti-bukti penerimaan negara bukan pajak dapat dilihat dalam **Lampiran 2**, sedangkan rincian Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Sumber Pendapatan PNBPN Tahun Anggaran 2018

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI
Pengembalian Belanja Barang TAYL Kudus	11 Januari 2018	8A3978Q1V3TDIGFI	Rp 900.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Pemalang	11 Januari 2018	AF0070T6II43N6FI	Rp 13.450.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Bawaslu Jateng	12 Maret 2018	CB34060EH9EJ70C2	Rp 1.500.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Bawaslu Jateng	12 Maret 2018	A4B746OF9EEGSR2	Rp 4.160.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Panwas Banyumas	12 Maret 2018	DDCB76OGHSVO6EC	Rp 3.120.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Panwas Kabupaten Magelang	12 Maret 2018	2CAD60HCV3TA3C2	Rp 2.496.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Panwas Kota Tegal	12 Maret 2018	03CD86OIEJGNC2	Rp 1.710.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Panwas Kabupaten Tegal	12 Maret 2018	905CE6OJ69QFN0C2	Rp 3.000.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Panwas Kabupaten Tegal	12 Maret 2018	D5EEE6OKA3BB43C2	Rp 1.500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	13 Februari 2018	62F7617DEFEQ0EIG	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	19 Februari 2018	7413E8MAO6516V61	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	07 Maret 2018	0404249GKLQNTQHGR	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	24 April 2018	920D28E84PSO1F4H	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	26 April 2018	E59EF6ROJLJFQGL0	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	08 Mei 2018	DF9D210FU7R924E0	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	23 Juli 2018	42F3036N12H8L61G	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	25 Juli 2018	DE7F23EODEQG79J1	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	10 Agustus 2018	5D654010RRLQ48L0	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	12 September 2018	FA2EC6F8VEF5QMOC	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	17 September 2018	033B52MQUPPV4HJ1	Rp 500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	13 Desember 2018	928F92Q1ANFF0K71	Rp 1.000.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	13 Desember 2018	B41D158S37BAJD6G	Rp 1.000.000
JUMLAH			Rp 39.336.000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp518.806.257.127

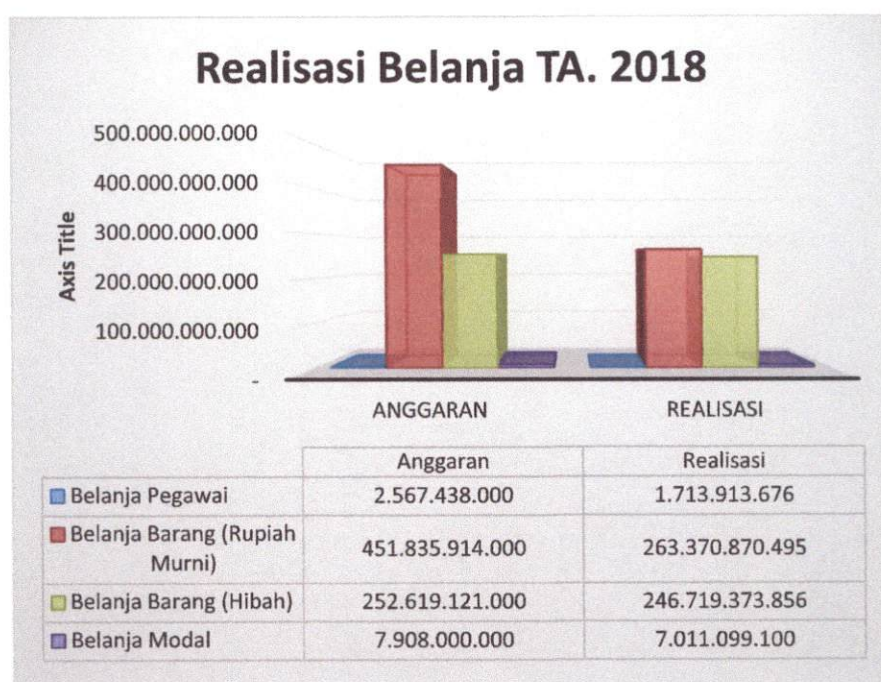
Realisasi Belanja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada TA 2018 adalah sebesar Rp518.806.257.127 atau 72,57% dari anggaran belanja sebesar Rp714.930.473.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Rupiah Murni	462.311.352.000	272.095.883.271	58,86
Belanja Pegawai	2.567.438.000	1.713.913.676	66,76
Belanja Barang	451.835.914.000	263.370.870.495	58,29
Belanja Modal	7.908.000.000	7.011.099.100	88,66
Pinjaman dan Hibah	252.619.121.000	246.710.373.856	97,66
Belanja Barang	252.619.121.000	246.710.373.856	97,66
TOTAL BELANJA	714.930.473.000	518.806.257.127	72,57

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA. 2018 mengalami kenaikan sebesar 401,13% dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2017. Hal ini disebabkan karena pada TA. 2018 terdapat tahapan pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018, dimana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki penambahan struktur pengawas di tingkat Desa/Kelurahan dan TPS yang mengakibatkan meningkatnya belanja honorarium dan operasionalnya sangat besar di TA. 2018, serta pada TA. 2018 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan belanja anggaran untuk tahapan

pengawasan Pemilu Tahun 2019 satu tahun penuh sedangkan TA. 2017 hanya 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	Naik (Turun) %
Rupiah Murni	272.095.883.271	61.149.038.930	344,97
Belanja Pegawai	1.713.913.676	1.063.948.507	61,09
Belanja Barang	263.370.870.495	51.638.402.012	410,03
Belanja Modal	7.011.099.100	8.446.688.411	(17,00)
Pinjaman dan Hibah	246.710.373.856	42.377.543.377	482,17
Belanja Barang	246.710.373.856	42.377.543.377	482,17
TOTAL BELANJA	518.806.257.127	103.526.582.307	401,13

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp1.713.913.676*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.1.713.913.676 dan Rp1.063.948.507. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 61,09 persen dari TA 2017. Kenaikan Belanja Pegawai antara lain disebabkan oleh adanya penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dari 3 (tiga) orang menjadi 7 (tujuh) orang sesuai dengan SK Bawaslu RI Nomor 0537/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018, mengakibatkan peningkatan belanja pegawai uang kehormatan Bawaslu Provinsi.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	175.193.200	166.547.900	5,19
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.120	2.928	6,56
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9.519.600	3.432.690	177,32
Belanja Tunj. Anak PNS	1.375.304	1.170.356	17,51
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.240.000	37.535.536	(19,44)
Belanja Tunj. PPh PNS	41.382.320	35.952.357	15,10
Belanja Tunj. Beras PNS	8.835.240	7.024.740	25,77
Belanja Uang Makan PNS	70.864.000	77.000.000	(7,97)
Belanja Tunj. Umum PNS	13.180.000	11.710.000	12,55
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.019.440.000	419.501.000	143,01
Belanja Uang Lembur PNS	36.630.000	55.244.000	(33,69)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	307.250.892	248.827.000	23,48
Jumlah Belanja Kotor	1.713.913.676	1.063.948.507	61,09
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1.713.913.676	1.063.948.507	61,09

B.4 Belanja Barang Rupiah Murni

*Belanja Barang
Rupiah Murni
Rp263.370.870.495*

Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp263.370.870.495 dan Rp51.638.402.012. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 410,03% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Kenaikan prosentase realisasi belanja barang dari rupiah murni TA. 2018 dibandingkan dengan TA. 2017 diantaranya disebabkan oleh:

1. Pada Tahun 2018 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan dua kegiatan pengawasan sekaligus yaitu kegiatan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tahapannya sudah dimulai sejak bulan September Tahun 2017.
2. Adanya penambahan jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tipe A, dari 2 Anggota menjadi 4 Anggota sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana pada TA. 2018 pembayaran honorariumnya masih menggunakan akun belanja barang operasional.

Perbandingan Belanja Barang RM TA. 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	165.680.194.724	18.206.791.900	809,99
Belanja Barang Non Operasional	17.842.229.145	2.991.965.800	496,34
Belanja Barang Persediaan	40.022.250	35.460.800	-
Belanja Jasa	32.065.650.923	6.446.962.005	397,38
Belanja Pemeliharaan	500.254.014	230.890.990	116,66
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	47.242.519.439	23.726.330.517	99,11

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp7.011.099.100*

Realisasi Belanja Modal TA. 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.011.099.100 dan Rp8.446.688.411. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar 17% dibandingkan TA 2017 dikarenakan sebagian belanja modal untuk pembentukan lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sudah terpenuhi di TA. 2017, keseluruhan Belanja Modal merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.011.099.100	8.446.688.411	(17,00)
Jumlah Belanja	7.011.099.100	8.446.688.411	(17,00)

Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp7.011.099.100, hanya sebesar Rp6.995.109.100 yang menimbulkan Aset Tetap, sedangkan Rp15.990.0000 tidak menimbulkan aset tetap, dikarenakan merupakan barang yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi.

Daftar belanja modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah Barang / Unit	Nilai Satuan	Nilai Total
1	Pel Steam	2	2.750.000	5.500.000
2	Vacum Cleaner	1	7.800.000	7.800.000
3	Mesin Pmotong Rumput	1	4.900.000	4.900.000
4	A.c Standing	2	24.800.000	49.600.000
5	Alat Penghancur Kertas	2	2.200.000	4.400.000
6	Mic Confrence	1	171.750.000	171.750.000
7	Meja Kerja Kayu	4	8.450.000	33.800.000
8	Kursi Besi	4	3.950.000	15.800.000
9	Mini Bus	8	398.371.000	3.186.968.000
10	P.C Unit	5	11.896.900	59.484.500
11	Lap Top	5	11.784.400	58.922.000
12	Printer	8	2.535.000	20.280.000
13	LCD Projector	2	6.903.100	13.806.200
14	Pesawat Telepon	20	499.500	9.990.000
15	Focusing Screen M	1	6.500.000	6.500.000
16	Focusing Screen 96 T	1	2.500.000	2.500.000
17	Megaphone	2	500.000	1.000.000
18	Microphone Camera	2	900.000	1.800.000
19	Microphone Wirelles	2	2.400.000	4.800.000
20	Televis 40"	2	4.800.000	9.600.000
21	Televisi 80"	1	22.500.000	22.500.000
22	Acces Point	8	400.000	3.200.000
23	Switch 8 Port	1	1.800.000	1.800.000
24	Switch 16 Port	2	2.200.000	4.400.000
25	Lensa Wide	1	20.000.000	20.000.000
26	Lensa Tele	2	1.700.000	3.400.000
27	Blitz Camera	2	2.000.000	4.000.000
28	Tripod	1	1.750.000	1.750.000
29	Steadicam	2	1.200.000	2.400.000
30	Clipp On	3	6.750.000	20.250.000
31	Bluray Player	1	12.500.000	12.500.000
32	Intercom Wirelles	6	1.200.000	7.200.000
33	P.C Unit	105	10.000.000	1.050.000.000
34	Printer	105	2.400.000	252.000.000
35	Telepon PABX	35	7.500.000	262.500.000
36	Pesawat Telepon	245	1.090.000	267.050.000
37	Meja Kerja Eselon III	175	4.250.000	743.750.000
38	Kursi Kerja Eselon III	175	1.300.000	227.500.000
39	Lemari Besi	5	3.729.000	18.645.000
40	Kursi Rapat	35	1.177.000	41.195.000
41	Filing Cabinet	3	4.598.000	13.794.000

42	Lemari Arsip	13	4.829.000	62.777.000
43	Meja Kerja Eselon III	4	5.385.600	21.542.400
44	Meja Kerja Eselon IV	11	5.225.000	57.475.000
45	Kursi Kerja Eselon III	4	2.970.000	11.880.000
46	Kursi Kerja Eselon IV	11	1.320.000	14.520.000
47	P.C Unit	1	24.750.000	24.750.000
48	P.C Unit	1	7.920.000	7.920.000
49	Hardisk External	1	11.880.000	11.880.000
50	ATR	1	149.320.000	149.320.000
TOTAL				7.011.099.100

B.6 Belanja Barang dari Hibah

*Belanja Barang
Dana Hibah
Rp246.710.373.856*

Realisasi belanja barang dari hibah TA. 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp246.710.373.856 dan Rp42.377.543.377. realisasi belanja barang dari hibah TA. 2018 mengalami kenaikan 482,17% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dari hibah TA. 2017. Hal ini antara lain disebabkan karena pada Tahun 2018 merupakan tahapan pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak di Jawa Tengah dimana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mulai membayarkan belanja honorarium dan belanja operasional pengawas desa/kelurahan yang mulai dibentuk di akhir Desember Tahun 2017, serta pengawas TPS yang baru terbentuk di bulan Juni 2018. Adapun perbandingan belanja barang dari hibah TA. 2018 dengan TA. 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Barang dari Hibah TA. 2018 dengan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Hibah	246.710.373.856	42.377.543.377	482,17
Jumlah Belanja	246.710.373.856	42.377.543.377	482,17

Adapun rincian belanja barang dari hibah Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2018

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional	144.316.165.000	143.797.355.955	99,64
Belanja Barang Non Operasional	33.157.162.000	31.814.445.852	95,95
Belanja Jasa	19.813.798.000	18.261.328.464	92,16
Belanja Pemeliharaan	936.558.000	901.648.262	96,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.395.438.000	51.935.595.323	95,48
Jumlah Belanja	252.619.121.000	246.710.373.856	97,66

Adapun rincian belanja barang dari hibah berdasarkan masing-masing register hibah Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Sesuai Register Hibah TA. 2018

URAIAN	REGISTER	REALISASI
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	2RFH18HA	223.446.101.322
Panwas Kabupaten Banyumas	2D9KEKPA	5.329.184.610
Panwas Kabupaten Karanganyar	2YZUTL4A	2.695.688.178
Panwas Kabupaten Kudus	2VF3PZKA	2.116.275.858
Panwas Kabupaten Magelang	2L3EU3NA	5.308.978.942
Panwas Kabupaten Tegal	2E16G7EA	3.644.610.711
Panwas Kabupaten Temanggung	235NM63A	3.167.396.111
Panwas Kota Tegal	2P1EERMA	1.002.138.124
Jumlah Belanja		246.710.373.856

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp66.483.162.590.

Perbandingan kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31
Desember dengan per 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	0	14.350.000	(100,00)
Kas lainnya di Kementrian/Lembaga dari Hibah	0	66.468.812.590	(100,00)
Jumlah Belanja	0	42.377.543.377	(100,00)

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.

Kas Lainnya dan Setara Kas Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 karena sudah tidak terdapat uang muka dari KPPN, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya di Kementrian Negara/Lembaga dari Hibah pada Bendahara Pengeluaran maupun pada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

LPJ tanggal 31 Desember 2018, berita acara pemeriksaan kas tanggal 31 Desember 2018, serta rekening koran dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

C.2 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

*Belanja Dibayar di
Muka
Rp20.307.610.000*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp20.307.610.000 dan Rp2.046.736.000. Kenaikan belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar 892,19% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017

dikarenakan oleh:

1. Pada Tahun 2018 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai petunjuk Sekretariat Jenderal Bawaslu RI melaksanakan kebijakan mengalihkan belanja modal kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi belanja sewa kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten/Kota selama 20 (dua puluh) bulan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018;
2. Adanya belanja sewa kendaraan operasional GAKKUMDU Provinsi selama 4 (empat) bulan pada bulan Desember 2018.

Perbandingan belanja dibayar di muka per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja dibayar di muka	20.307.610.000	2.046.736.000	892,19
Jumlah Belanja	20.307.610.000	42.377.543.377	892,19

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Adapun Rincian belanja dibayar di muka adalah sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH UNIT	LAMA SEWA	LAMA BEBAN	Nilai Total	Pengakuan Beban	Belanja dibayar dimuka
Sewa Kendaraan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota	202	20	1	21.348.800.000	1.067.440.000	20.281.360.000
Sewa Kendaraan Operasional GAKKUMDU Provinsi	2	4	1	35.000.000	8.750.000	26.250.000
Jumlah				21.383.800.000	1.076.190.000	20.307.610.000

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp2.619.000*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.619.000 dan Rp3.997.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penurunan Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar 34,48% dibanding dengan per 31 Desember 2017 terjadi karena adanya optimalisasi penggunaan barang konsumsi di akhir tahun. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Barang Konsumsi	2.619.000	3.997.000	(34,48)
Jumlah	2.619.000	3.997.000	(34,48)

Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp17.579.378.911*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp17.579.378.911 dan Rp10.747.839.811. Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	17.579.378.911	10.747.839.811	63,56
Jumlah Belanja	17.579.378.911	42.377.543.377	63,56

Kenaikan peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar 63,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 diantaranya adalah karena adanya belanja modal 8 (delapan) unit kendaraan dinas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp3.186.968.000.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desemberr 2017	10.747.839.811
Mutasi tambah:	
Pembelian	6.861.779.100
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	(14.250.000)
Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	(15.990.000)
Saldo per 31 Desember 2018	17.579.378.911
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(5.247.252.975)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	12.332.125.936

Rincian pembelian peralatan dan mesin TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA. 2018

No	Jenis Barang	Jumlah Barang / Unit	Nilai Satuan	Nilai Total
1	Pel Steam	2	2.750.000	5.500.000
2	Vacum Cleaner	1	7.800.000	7.800.000
3	Mesin Pmotong Rumput	1	4.900.000	4.900.000
4	A.c Standing	2	24.800.000	49.600.000
5	Alat Penghancur Kertas	2	2.200.000	4.400.000
6	Mic Confrence	1	171.750.000	171.750.000
7	Meja Kerja Kayu	4	8.450.000	33.800.000
8	Kursi Besi	4	3.950.000	15.800.000
9	Mini Bus	8	398.371.000	3.186.968.000
10	P.C Unit	5	11.896.900	59.484.500
11	Lap Top	5	11.784.400	58.922.000
12	Printer	8	2.535.000	20.280.000
13	LCD Projector	2	6.903.100	13.806.200
14	Pesawat Telepon	20	499.500	9.990.000
15	Focusing Screen M	1	6.500.000	6.500.000
16	Focusing Screen 96 T	1	2.500.000	2.500.000
17	Megaphone	2	500.000	1.000.000
18	Microphone Camera	2	900.000	1.800.000
19	Microphone Wirelles	2	2.400.000	4.800.000
20	Televis 40"	2	4.800.000	9.600.000
21	Televisi 80"	1	22.500.000	22.500.000
22	Acces Point	8	400.000	3.200.000
23	Switch 8 Port	1	1.800.000	1.800.000
24	Switch 16 Port	2	2.200.000	4.400.000
25	Lensa Wide	1	20.000.000	20.000.000
26	Lensa Tele	2	1.700.000	3.400.000
27	Blitz Camera	2	2.000.000	4.000.000
28	Tripod	1	1.750.000	1.750.000
29	Steadicam	2	1.200.000	2.400.000
30	Clipp On	3	6.750.000	20.250.000
31	Bluray Player	1	12.500.000	12.500.000
32	Intercom Wirelles	6	1.200.000	7.200.000

33	P.C Unit	105	10.000.000	1.050.000.000
34	Printer	105	2.400.000	252.000.000
35	Telepon PABX	35	7.500.000	262.500.000
36	Pesawat Telepon	245	1.090.000	267.050.000
37	Meja Kerja Eselon III	175	4.250.000	743.750.000
38	Kursi Kerja Eselon III	175	1.300.000	227.500.000
39	Lemari Besi	5	3.729.000	18.645.000
40	Kursi Rapat	35	1.177.000	41.195.000
41	Filing Cabinet	3	4.598.000	13.794.000
42	Lemari Arsip	13	4.829.000	62.777.000
43	Meja Kerja Eselon III	4	5.385.600	21.542.400
44	Meja Kerja Eselon IV	11	5.225.000	57.475.000
45	Kursi Kerja Eselon III	4	2.970.000	11.880.000
46	Kursi Kerja Eselon IV	11	1.320.000	14.520.000
47	P.C Unit	1	24.750.000	24.750.000
48	P.C Unit	1	7.920.000	7.920.000
49	Hardisk External	1	11.880.000	11.880.000
TOTAL				6.861.779.100

Mutasi kurang penghentian penggunaan BMN terdiri atas:

No	URAIAN BARANG	JUMLAH UNIT	NILAI PEROLEHAN
1	Kursi Besi	2	1.520.000
2	Mesin Scanner Faximile	1	1.950.000
3	Printer	2	10.780.000
Akumulasi Penyusutan			14.250.000

Atas penghentian penggunaan BMN yang dihentikan penggunaannya tersebut direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya sebagai Aset Lain-Lain.

Sedangkan mutasi kurang berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel rinciannya adalah sebagai berikut:

No	URAIAN BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA/UNIT	TOTAL NILAI
1	Megaphone	2	500.000	1.000.000
2	Microphone Wireles MIC	2	900.000	1.800.000
3	Telfon Digital	20	499.500	9.990.000
4	Acces Poit	8	400.000	3.200.000
TOTAL NILAI				15.990.000

C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp9.375.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sama, yaitu sebesar Rp9.375.000 atau dengan kata lain tidak terdapat penambahan ataupun

pengurangan Jalan, irigasi, dan jaringan di TA. 2018. Nilai Saldo jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp9.375.000 merupakan transfer masuk Tahun 2014 dari Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia (eselon I).

Aset Tetap

Lainnya

Rp149.320.000

C.6 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp149.320.000 dan Rp0. Perbandingan aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Aset Tetap Lainnya	149.320.000	0	0,00
Jumlah Belanja	149.320.000	0	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya timbul di Tahun 2018 karena adanya belanja modal Aset Tetap Renovasi (ATR) terhadap pekerjaan pembuatan ruang sidang pada bangunan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

(Rp5.256.627.975)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp5.256.627.975) dan (Rp2.453.376.886). Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.256.627.975)	(2.453.376.886)	114,26
Jumlah Belanja	(5.256.627.975)	(2.453.376.886)	114,26

Kenaikan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dibandingkan per 31 Desember 2017 karena sebanding

dengan adanya kenaikan nilai Aset Tetap. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17.579.378.911	5.247.252.975	12.332.125.936
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	9.375.000	0
Akumulasi Penyusutan		17.588.753.911	5.256.627.975	12.332.125.936

C.7 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp14.250.000*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp14.250.000 dan Rp3.190.000. Prosentase perbandingan antara Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Aset Lain Lain	14.250.000	3.190.000	346,71
Jumlah Belanja	14.250.000	3.190.000	346,71

Kenaikan aset lain lain per 31 Desember 2018 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar 346,71% dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap yang telah rusak senilai Rp14.250.000, sedangkan saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2017 senilai Rp3.190.000 berupa 2 (dua) unit kursi dan 1 (satu) unit printer telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan barang, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 pasal 42 tidak disajikan dalam neraca.

Rincian aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset lain-lain pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset lain-lain pada TA. 2018

No	URAIAN BARANG	JUMLAH UNIT	NILAI PEROLEHAN
1	Kursi Besi	2	1.520.000
2	Mesin Scanner Faximile	1	1.950.000
3	Printer	2	10.780.000
Akumulasi Penyusutan			14.250.000

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp13.462.559)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp13.462.559) dan (Rp3.066.000). Perbandingan Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(13.462.559)	(3.066.000)	339,09
Jumlah Belanja	(13.462.559)	(3.066.000)	339,09

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebanding dengan kenaikan nilai Aset Lainnya di Tahun 2018 yang timbul karena adanya Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Amortisasi Aset 2 (dua) unit kursi besi, 1 (satu) unit mesin scanner faximile, serta 2 (dua) unit printer yang sudah dalam kondisi rusak berat.

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp14.609.011 dan

Rp14.609.011

Rp72.603.760. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Perbandingan utang pihak ketiga per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Utang Kepada Pihak Ketiga	14.609.011	72.603.760	(79,88)
Jumlah Belanja	14.609.011	72.603.760	(79,88)

Penurunan utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar 79,88% dikarenakan pada akhir Tahun 2018 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki beban langganan telepon dan listrik bulan Desember 2018 yang belum terbayar. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2018	13.988.071	Dibayar tanggal 15 Januari 2019
Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2018	620.940	Dibayar tanggal 15 Januari 2019
Total	14.609.011	

Bukti pembayaran beban langganan telepon dan listrik bulan Desember 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

C.11 Ekuitas

Ekuitas

Rp32.777.853.366

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp32.777.853.366 dan Rp76.778.503.755. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Perbandingan ekuitas per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Ekuitas	32.777.853.366	76.778.503.755	(57,31)
Jumlah Belanja	32.777.853.366	76.778.503.755	(57,31)

Penurunan nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 terhadap nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar 57,31% terjadi karena adanya defisit LO yang sangat besar di Tahun 2018 yang mengakibatkan turunnya Ekuitas per 31 Desember 2018.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan PNB
Rp7.500.000*

Total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per tanggal 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp7.500.000,- dan Rp18.823.602.

Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017	NAIK (TURUN) %
PNBP	7.500.000	18.823.602	(60,16)
Jumlah Belanja	7.500.000	18.823.602	(60,16)

Penurunan PNB Tahun 2018 sebesar 60,16% dibanding Tahun 2017 dikarenakan selama Tahun 2018 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah tidak menerima pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp7.500.000 tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Anggaran Lain-lain	7.500.000
Total	7.500.000

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp7.500.000 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Klaten Tahun 2008	4.500.000
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Wonogiri Tahun 2008	3.000.000
Total	7.500.000

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah Pendapatan Negara yang diperoleh melalui Satker yang berasal dari selain Pajak.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.713.913.676

Total Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.713.913.676 dan Rp1.063.948.507. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	175.193.200	166.547.900	5,19
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.120	2.928	6,56
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	9.519.600	3.432.690	177,32
Belanja Tunjangan Anak PNS	1.375.304	1.170.356	17,51
Belanja Tunjangan Struktural PNS	30.240.000	37.535.536	(19,44)
Belanja Tunjangan PPh PNS	41.382.320	35.952.357	15,10
Belanja Tunjangan Beras PNS	8.835.240	7.024.740	25,77
Beban Uang Makan PNS	70.864.000	77.000.000	(7,97)
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.180.000	11.710.000	12,55
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.019.440.000	419.501.000	143,01
Belanja Uang Lembur	36.630.000	55.244.000	(33,69)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	307.250.892	248.827.000	23,48

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp41.400.250

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp41.400.250 dan Rp33.281.800. Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2018 dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	41.400.250	33.281.800	24,39
Jumlah Belanja	41.400.250	33.281.800	24,39

Kenaikan Beban Persediaan selama Tahun 2018 sebesar 24,39% terhadap Tahun 2017 terjadi karena naiknya penggunaan barang konsumsi di Tahun 2018. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi

atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Keseluruhan Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 merupakan Beban Persediaan Konsumsi.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp391.228.460.271*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp391.228.460.271 dan Rp58.149.312.693. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	307.127.489.879	37.130.203.455	727,16
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.983.360.000	846.180.000	134,39
Beban Barang Operasional Lainnya	360.130.300	173.145.900	107,99
Beban Bahan	32.376.314.297	8.532.302.230	279,46
Beban Honor Output Kegiatan	17.136.715.000	676.180.000	2434,34
Beban Barang Non Operasional Lainnya	143.645.700	0	0,00
Beban Langganan Listrik	808.686.266	151.673.263	433,18
Beban Langganan Telepon	122.951.609	292.044.388	(57,90)
Beban Langganan Air	75.875.146	17.883.779	324,27
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1.695.700	(100,00)
Beban Jasa Pos dan Giro	5.869.500	14.103.200	(58,38)
Beban Sewa	20.356.050.250	4.787.829.557	325,16
Beban Jasa Profesi	7.323.965.000	3.966.300.000	84,65
Beban Jasa Lainnya	3.391.417.324	1.559.771.221	117,43
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	15.990.000	0	0,00
Jumlah	391.228.460.271	58.149.312.693	4.752

Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018

melaksanakan 2 (dua) kegiatan pengawasan, yaitu kegiatan pengawasan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.398.402.276*

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.398.402.276 dan Rp1.032.185.013. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena termasuk beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di 35 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 573 Panwas Kecamatan se-Jawa Tengah. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	687.228.037	561.666.124	22,36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	711.174.239	466.111.889	52,58
Jumlah	1.398.402.276	1.027.778.013	74,93

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp99.124.730.805*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp99.124.730.805 dan Rp32.889.582.742. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas TA. 2018 sebesar 4998,41% dibanding TA. 2017 disebabkan bertambahnya struktur pengawas pemilu ditingkat desa/kelurahan serta pengawas TPS. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7.452.047.586	11.316.762.242	-34,15
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.698.150.500	725.010.000	2754,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.106.725.944	19.086.221.500	57,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.867.806.775	1.761.589.000	2219,94
Jumlah	99.124.730.805	32.889.582.742	4998,41

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.816.837.648*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.816.837.648 dan Rp1.341.888.287. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA. 2018 sebesar 110,09% dibanding TA. 2017 dikarenakan adanya penambahan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin atas pembelian 7 (tujuh) unit kendaraan dinas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2018. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.814.751.154	1.339.765.287	110,09
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1.875.000	1.875.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	211.494	248.000	(14,72)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.816.837.648	1.341.888.287	95,37

D.8 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp17.486.000*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	17.486.000	14.350.000	21,85
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	17.486.000	14.350.000	21,85

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp76.778.503.755

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp76.778.503.755 dan Rp26.685.635.632. Perbandingan Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 dengan tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2018
dengan 1 Januari 2017*

URAIAN	01 Januari 2018	01 Januari 2017	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Awal	76.778.503.755	26.685.635.632	187,71
Jumlah	76.778.503.755	26.685.635.632	187,71

Kenaikan Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 dibandingkan pada 1 Januari 2017 karena pada Tahun 2017 terjadi kenaikan nilai Ekuitas diantaranya karena adanya pengesahan penerimaan hibah langsung pada tahun 2017.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp496.298.758.926)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp496.298.758.926) dan (Rp94.472.625.940). Perbandingan Defisit LO pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Defisit - LO	(496.298.758.926)	(94.472.625.940)	425,34
Jumlah	(496.298.758.926)	(94.472.625.940)	425,34

Kenaikan Defisit-LO TA. 2018 dibandingkan TA. 2017 terjadi karena pada TA. 2018 Seluruh belanja hibah atas anggaran pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan

wakil walikota telah disahkan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.2 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
(Rp3.401.134.776)*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp3.401.134.776) dan (Rp5.987.131.079). Perbandingan Koreksi lain-lain Tahun 2018 dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	periode 31 Desember 2018	periode 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Koreksi Lain-Lain	(3.401.134.776)	(5.987.131.079)	(43,19)
Jumlah	(3.401.134.776)	(5.987.131.079)	(43,19)

Koreksi Lain-lain periode 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 43,19% dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 dikarenakan pada Tahun 2017 hanya ada 2 (dua) Panwas Kabupaten yang memperoleh seluruh kebutuhan anggaran pengawasan bupati dan wakil bupati sehingga menimbulkan pengembalian sisa hibah di Tahun 2018 yang pendapatannya pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) kKabupaten/Kota. Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 ini berasal dari transaksi pengembalian hibah langsung uang kepada pendonor yang pendapatannya di TAYL.

Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2018

Uraian	Nilai Koreksi
SP4HL Panwas Kabupaten Banyumas	1.943.471.090
SP4HL Panwas Kabupaten Magelang	1.457.663.686
Jumlah	3.401.134.776

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp455.699.243.313*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp455.699.243.313 dan

Rp150.651.145.082. Perbandingan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	periode 31 Desember 2018	periode 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Transaksi Antar Entitas	455.699.243.313	150.651.145.082	202,49
Jumlah	455.699.243.313	150.651.145.082	202,49

Kenaikan Transaksi Antar Entitas periode 31 Desember 2018 sebesar 202,49% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2017 karena adanya kenaikan nilai belanja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	272.095.883.271
Diterima dari Entitas Lain	(39.336.000)
Pengesahan Hibah Langsung	238.921.324.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(55.278.627.958)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Per 31 Desember 2018, DKEL sebesar Rp.272.095.883.271 sedangkan DDEL sebesar (Rp39.336.000).

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp238.921.324.000.

Rincian Pengesahan Pendapatan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pengesahan (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	226.234.352.000
2	Panwas Kabupaten Karanganyar	2.750.000.000
3	Panwas Kabupaten Kudus	2.944.380.000
4	Panwas Kabupaten Tegal	3.378.449.000
5	Panwas Kabupaten Temanggung	2.693.143.000
6	Panwas Kota Tegal	921.000.000
TOTAL NILAI PENGESAHAN HIBAH		238.921.324.000

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp55.278.627.958.

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pengesahan (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	50.768.517.153
2	Panwas Kabupaten Karanganyar	310.899.774
3	Panwas Kabupaten Kudus	1.578.391.142
4	Panwas Kabupaten Tegal	1.728.504.607
5	Panwas Kabupaten Temanggung	645.530.889
6	Panwas Kota Tegal	246.784.393
TOTAL NILAI PENGESAHAN HIBAH		55.278.627.958

Keseluruhan pendapatan anggaran hibah Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018 yang diperoleh di tahun 2018 ini sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah sudah diterima dan telah disahkan menjadi SPHL, sedangkan seluruh sisa Hibah Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang pendapatannya pada TA. 2017 sudah disetor oleh

masing-masing Panwas Kabupaten/Kota dan telah diterbitkan SP4HL. Bukti SP2HL dan SP4HL dapat di lihat di **Lampiran 6**.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp32.777.853.366

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.777.853.366 dan Rp76.877.023.695.